

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Effendi
Tempat/tgl Lahir : Jakarta, 20-04-1945
Alamat : Jatinegara Lio No. 16 Rt. 08/03 Jakarta Timur
Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD Jakarta Lulus 1957
SMP Jakarta Lulus 1960
SMA Jakarta Lulus 1963
FE UI Lulus 1986

Pekerjaan :

1. Kep. Seksi Kelembagaan Ditjen Moneter Departemen Keuangan
2. Kep. Bagian Hukum & Informasi Ditjen Moneter Departemen Keuangan
3. Direktur Informasi BUMN Departemen Keuangan
4. Direktur Jasa keuangan Departemen Keuangan
5. Direktur BUMN III Departemen Keuangan
6. Sekditjen Pembinaan BUMN Departemen Keuangan
7. Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan Kementrian BUMN

Penugasan :

1. Anggota Komisaris PT. Asuransi Umum Indonesia
2. Anggota Komisaris PT. Asuransi Ekspor Indonesia
3. Anggota Komisaris PT. Pupuk Kujang
4. Anggota Komisaris PT. Pupuk Iskandar Muda
5. Anggota Komisaris PT. Jasa Rahardja

LAMPIRAN-1

DATA PT TELKOM Tbk (Indonesia)

	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06
Rentabilitas	12.6	8.6	6.7	12.2	14.9	21.4	29.8	26.0	25.9	28.7	31.8
Likuiditas	368.7	369.4	340.3	288.8	248.9	76.5	108.6	80.1	78.8	76.3	67.8
Solvabilitas	200.7	194.7	179.7	186.0	254.2	250.7	254.8	277.9	290.2	326.2	409.6
P Margin	40.8	27.4	21.6	38.0	37.8	40.2	56.5	42.2	37.6	38.8	42.9
Rasio Operasi	173.4	174.7	165.0	160.7	184.9	183.7	178.2	179.1	169.6	169.7	172.7
EBIT	2,071	1,622	1,425	2,962	4,608	6,550	11,749	11,452	12,749	16,242	21,993

DATA PT. TELKOM Tbk (Indonesia) (Rp. In billion)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Aktiva Lancar	7,850	8,755	8,900	9,800	10,300	7,300	10,547	8,942	9,204	10,305	13,921
Aktiva Tetap Netto	8,582	10,165	12,285	14,452	20,553	23,344	28,826	35,080	40,071	46,193	55,233
Modal rata-rata	16,432	18,920	21,185	24,252	30,853	30,644	39,373	44,022	49,275	56,498	69,154
Total Aktiva	17,669	19,819	23,693	26,330	32,019	33,036	44,307	50,283	56,269	62,171	75,136
Kewajiban Lancar	2,129	2,370	2,615	3,393	4,138	9,543	9,708	11,170	11,677	13,513	20,536
Kewajiban Tdk Lancar	6,673	7,811	10,570	10,763	6,673	13,177	17,389	18,092	19,392	19,061	18,344
Total Hutang	8,802	10,181	13,185	14,156	12,594	13,177	17,389	18,092	19,392	19,061	18,344
Penjualan/Pendapatan	5,076	5,909	6,600	7,790	12,190	16,284	20,803	27,116	33,948	41,807	51,294
Total Biaya	2,927	3,383	4,000	4,847	6,594	8,864	11,673	15,141	20,021	24,636	29,701
EBIT	2,071	1,622	1,425	2,962	4,608	6,550	11,749	11,452	12,749	16,242	21,993

Lampiran-4

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN KEMENTERIAN BUMN**

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 826/ KMK.013/1992 tentang pengukuran tingkat kesehatan BUMN?

.....
.....
.....

2. Apakah keputusan menteri keuangan tersebut relevan digunakan pada semua BUMN yang masing-masing BUMN memiliki karakter sendiri?

.....
.....
.....

3. Apakah rasio RLS dan Rasio Tambahan dapat objektif dijadikan alat ukur kesehatan BUMN?

.....
.....
.....

4. Apakah perlu perubahan atau penambahan rasio dalam pengukuran tingkat kesehatan BUMN?

.....
.....
.....

5. Penggunaan rasio-rasio keuangan untuk menilai kinerja BUMN, Bagaimana saran Bapak/Ibu agar penggunaan rasio tersebut objektif dan dapat dijadikan ukuran yang baik?

.....
.....
.....

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN ANALIS**

- 1) BUMN memiliki ukuran sendiri dalam menilai tingkat kesehatan-nya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 826/ KMK.013/1992, Bagaimana menurut Bapak/Ibu?

.....
.....
.....
.....

- 2) Apakah Bapak/Ibu menggunakan ukuran tersebut dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam perusahaan BUMN yang masing-masing BUMN memiliki karakter sendiri?

.....
.....
.....
.....

- 3) Apakah rasio RLS dan Rasio Tambahan dapat objektif dijadikan alat ukur kesehatan BUMN?

.....
.....
.....
.....

- 4) Apakah perlu perubahan atau penambahan rasio dalam pengukuran tingkat kesehatan BUMN?

.....
.....
.....
.....

- 5) Penggunaan rasio-rasio keuangan untuk menilai kinerja BUMN, Bagaimana saran Bapak/Ibu agar penggunaan rasio tersebut objektif dan dapat dijadikan ukuran yang baik?

.....
.....
.....
.....

HASIL WAWANCARA

Tanggapan Bapak/Ibu terhadap KMK RI No. 826/KMK.013/1992 tentang pengukuran tingkat kinerja BUMN

Secara umum KMK tersebut sudah cukup bagus untuk digunakan dalam pengukuran tingkat BUMN, namun mengingat bahwa dalam pengukuran pencapaian kinerja yang diperhitungkan adalah realisasi dibandingkan dengan anggarannya maka dalam penyusunan anggaran, analisis dan penetapan asumsi hendaknya dilakukan secara tajam sehingga anggaran yang disusun merupakan proyeksi keuangan yang mendekati realistis, optimal dan dapat dicapai.

Apakah KMK tersebut relevan digunakan pada semua BUMN yang masing-masing BUMN memiliki karakter sendiri.

Memperhatikan bahwa indikator kinerja yang digunakan merupakan pengukuran kinerja keuangan, secara umum KMK tersebut relevan digunakan untuk semua BUMN. Namun demikian, untuk BUMN dengan karakteristik khusus perlu adanya tambahan indikator yang sesuai karakteristik BUMN yang bersangkutan.

Apakah rasio RLS dan rasio tambahan dapat objektif digunakan alat ukur kesehatan BUMN?

Dalam kondisi normal RLS dan indikator tambahan sudah cukup objektif karena memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam mengukur kinerja operasionalnya, kewajiban kepada pihak ketiga, efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Namun dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*extraordinary event*) di luar control manajemen, perlu adanya justifikasi terhadap kinerja perusahaan.

Apakah perlu perubahan atau penambahan rasio dalam pengukuran tingkat kesehatan BUMN?

Agar pengukuran tingkat kesehatan bisa relevan digunakan untuk semua BUMN, rasio masih perlu dimodifikasi untuk lebih mempertajam pengukuran misalnya dengan membandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan juga benchmarking dengan industri sejenis.

Penggunaan rasio-rasio keuangan untuk menilai kinerja BUMN, bagaimana saran Bapak agar penggunaan rasio tersebut objektif dan dapat dijadikan usuran yang baik.

Dalam penyusunan anggaran, analisis dan penetapan asumsi hendaknya dilakukan secara tajam sehingga anggaran yang disusun merupakan proyeksi keuangan yang realistis, optimal dan dapat dicapai;

Perlu adanya justifikasi terhadap kinerja perusahaan dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*extraordinary event*) di luar kontrol manajemen.

Modifikasi untuk lebih mempertajam pengukuran dengan membandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan benchmarking dengan industri sejenis.